

MODAL SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN

Amir Fadhilah

Dosen pada Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora & Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: fadhi_uin@yahoo.com

Abstract:

Development as the part of the government project, it sometimes does not involve the local community in process of decision making. It is because the government tend to the mode of top down approach. As return for this the local community (villagers) is marginalized the development strategy implemented recently, ignoring the indigenous knowledge system, where it reflects on cultural values of community and cares to environment as the form of social capital owned by community to become social tenacity.

Key words: participation, indigenous knowledge, social capital, social tenacity

Abstrak:

Pembangunan sebagai bagian dari proyek pemerintah seringkali kali tidak melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan, sebab lebih condong pada model pembangunan yang mengacu pada top down approach. Akibatnya keterlibatan penduduk lokal (pedesaan) terpinggirkan, strategi pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengabaikan system pengetahuan (kearifan) lokal yang merupakan refleksi nilai-nilai budaya masyarakat dan ramah lingkungan sebagai wujud dari modal sosial yang dimiliki masyarakat dalam membentuk ketahanan sosialnya.

Kata kunci: partisipasi, kearifan lokal, modal sosial, ketahanan sosial

Pendahuluan

Apabila kita simak kebelakang pada era tahun 1950–1970-an ketika Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, regim Orde Baru yang didukung tim modernisme memandang bahwa hal-hal yang berkaitan dengan budaya tradisional dianggap sebagai penghambat pembangunan. Dalam konteks ini para penggagas modernisasi banyak menerima kritikan terhadap statemen dikesampingkannya nilai-nilai tradisional dalam pembangunan. Padahal pandangan dan sikap terhadap kebudayaan tradisional seperti

itu sangat keliru dan bertentangan dengan proses pembangunan di masyarakat.¹ Lebih lanjut Dove menyatakan bahwa kebudayaan tradisional terkait erat dan secara langsung menunjang proses sosial, ekonomis dan ekologi masyarakat secara mendasar. Dengan demikian pandangan yang menganggap bahwa kebudayaan tradisional itu kuno, statis dan menghambat pembangunan sangat tidak tepat. Sebab

¹Dove, R, Michael (Ed),1985, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

masyarakat tradisional di Indonesia sebagaimana halnya di negara-negara berkembang lainnya, tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis. Bersamaan dengan perubahan lingkungan sosial dan alamnya, mereka juga berubah dalam proses adaptasi.

Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian para ahli, misalnya penelitian Jeffrey D. Brewer dalam Dove (1985) tentang penggunaan tanah tradisional dan kebijakan pemerintah di Bima menunjukkan bagaimana petani-petani menyesuaikan praktek-praktek tanah mereka dengan kebijakan dan persepsi pemerintah-pemerintah pusat. Demikian juga penelitian Dove (1985) tentang orang Kantu yang telah mengubah pola pemukiman mereka dari pola pemukiman yang didasarkan pada rumah panjang yang kecil dan bersifat sementara menjadi pola pemukiman yang lebih besar dan permanen. Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat tradisional Indonesia tidak statis sebab mereka menerima terhadap pembaharuan.

Salah satu masalah utama di dalam agenda pemberdayaan warga pada berbagai tingkat kelembagaan adalah mengamankan produksi, distribusi dan konsumsi warga untuk memenuhi syarat-syarat kemanusiaan dan ekologis setempat.² Dalam konteks ini penguatan akses dan kontrol warga melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat partisipatif dan dapat menghormati syarat-syarat sosial serta ekologis merupakan agenda yang harus

²Thamrin Juni., 2003, *Catatan-catatan Mengenai Pemberdayaan Pranata Sosial Melalui Pendekatan Partisipasi Sosial*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam mewujudkan ketahanan Sosial' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 13 Mei 2003, Jakarta

diwujudkan secara bersama. Persyaratan kemanusiaan dan ekologis ditempatkan sebagai titik utama dalam membangun kembali relasi produksi, distribusi dan konsumsi dalam kehidupan masyarakat, harus diletakkan pada siklus normal ekosistem setempat.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui dan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Kenyataan yang ada justru berbeda, dimana dalam proyek pembangunan pemerintah, masyarakat local seringkali tidak dilibatkan. Kondisi ini tidak lepas dari model pembangunan yang berorientasi dari atas (*top down*) sebagaimana yang telah berlangsung selama tiga puluhan tahun. Dalam konteks ini desa seringkali dianggap sebagai ajang berbagai pelaksanaan proyek pembangunan sektoral, regional, daerah ataupun nasional.

Menyimak ke belakang perjalanan regim Orde Baru kita melihat bahwa pemerintah ketika itu lebih memfokuskan kepada pembentukan pranata social modern , seperti KUD, Kelompok Tani, Karang taruna, Kelompencapir dan lain-lain untuk mendukung program pembangunan nasional yang digulirkan pemerintah ketika itu. Setelah pembangunan berjalan selama lebih dari 32 tahun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pranata social modern tersebut kurang mampu menggalang partisipasi masyarakat secara murni. Dalam konteks ini kurang berfungsinya secara efektif pranata tersebut disebabkan pembentukannya tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat local, kondisi seperti ini oleh Nico Schulte Nordholt (1987) di gambarkan sebagai pembangunan atas perintah.³

Masalah tersebut mencerminkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat.

³ Nordholt, Nico S., 1987, *Ojo Dumeh : Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Dalam konteks siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial tersebut kalau bukan lembaga dan komunitas sendiri sebagai unit masyarakat. Potensi *social capital* (modal sosial) lembaga dan komunitaslah yang akhirnya diharapkan menjadi institusi penyelamat mereka. Permasalahannya apakah *social capital* masih eksis di Tanah Air?. Jika ya, apakah *social capital* masih berfungsi dengan baik?. Namun demikian apakah eksistensi *social capital* sebagai sebuah 'produk' masyarakat masa lampau masih dapat dipertahankan dan dikembangkan sebagai sebuah *social capital* masyarakat maju?. Makalah ini akan mendeskripsikan peranan *social capital* dalam pembentukan ketahanan sosial masyarakat pedesaan.

Mengacu pada pemikiran di atas, tujuan pembahasan kajian ini adalah pertama untuk memahami konsep modal sosial dan relevansinya dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat pedesaan di Indonesia, kedua untuk membahas aspek-aspek apa saja yang dapat dijadikan indikator dalam memahami dan mengidentifikasi *social capital* (modal sosial) di tanah air, dan ketiga untuk membahas dan menganalisa keterkaitan antara sosial kapital dengan kearifan lokal dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat

Makna Modal Sosial

Pemerintahan Orde Baru sebagaimana kita ketahui lebih mengutamakan kesanggupan aparatur negara pada semua jenjang dalam melaksanakan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat dan Pemda dalam pembangunan menjadi terabaikan. Sementara itu, tingginya kepercayaan pemerintah pusat terhadap aparatur negara (pegawai pusat yang ditempatkan di daerah) dalam melaksanakan pembangunan mulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan program pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan. Kondisi ini di satu sisi berhasil membangun struktur birokrasi rak-sasa yang kuat, akan tetapi disisi lain justru melemahkan peranan pemerintah daerah dan pranata *social local*.⁴ Dalam konteks ini selama tiga dasawarsa terakhir pemerintah Orde baru lebih terfokus pada pembentukan pranata *social modern* baru yang seringkali menggantikan pranata *social tradisional* yang ada di masyarakat. Menurut Nuryana *Social capital* merupakan suatu keistimewaan tentang organisasi *social*, seperti jaringan-jaringan kerja, norma-norma dan kepercayaan yang memfasilitasi terciptanya koordinasi dan koorperasi bagi kepentingan bersama. Perlu diingat bahwa kinerja *social capital* tergantung pada partisipasi aktif anggotanya.

Pranata *social* merupakan *asset social* masyarakat dan dianggap sebagai modal *social*. Sebagaimana layaknya sebuah *asset*, maka pranata *social* dapat direkayasa dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat. Masyarakat senantiasa berubah secara dinamis, demikian juga dengan pranata *social* cepat atau lambat akan mengalami perubahan baik karena beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tergantung kepada sejauhmana kesanggupan dan kemampuan serta kompetensi warga masyarakat dalam mengantisipasi perubahan tersebut.

Fukuyama (2001) menyatakan bahwa modal sosial merupakan norma informal yang mendorong kerjasama antara individu dalam masyarakat. Jadi dalam modal *social* menciptakan suasana lingkungan hidup yang saling mem-

⁴Nuryana Mu'man, 2002, *Perspektif Social capital Dalam Pengembangan Ketahanan social Masyarakat*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta

percaya dan menghormati antar anggotanya. Lebih lanjut Fukuyama menjelaskan bahwa dalam modal social lebih mengacu pada adanya: (1) *trust* (*kepercayaan*), hal ini sangat penting karena adanya kepercayaan maka hubungan akan menjadi semakin kuat, semakin besar *trust* ini dibangun maka semakin besar *networking* dari *trust* itu sendiri. (2) *informal*, menjadi dasar terbentuknya hubungan yang kuat dan berada dalam konteks masyarakat yang beradab. (3) *Networking* (*jejaringan*).⁵

Fukuyama menyatakan ada empat sumber modal social, yaitu ; (1) *Informal irrational*, yaitu suatu hal yang tabu dilaksanakan. (2). *Formal irasional* merupakan daya keyakinan agama, politik dan adat. (3) *Informal rasional*, merupakan kesepakatan dalam masyarakat yang diperoleh dari musyawarah untuk mufakat. (4) *Formal rasional*, yaitu aturan hukum yang berlaku dan jika ada pelanggaran ada sanksinya.

Modal social terdiri dari berbagai jenis aset social yang mampu mendatangkan hasil yang menguntungkan,⁶ misalnya efisiensi terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, jiwa kebersamaan atau bekerjasama dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat.

Portes (1998) menyatakan modal social merupakan sejumlah sumber yang nyata atau potensial yang menghubungkan milik dalam jaringan yang telah lama terlembagakan dalam hubungan saling mengenal. Fokusnya pada keuntungan pertumbuhan bagi individu yang mengandung partisipasi di dalam kelompok dan konstruksi yang sengaja secara social untuk tujuan

menciptakan sumber tersebut. Modal social berangkat sejauh mungkin menegaskan bahwa keuntungan yang tumbuh dari anggota kelompok merupakan basis dari solidaritas. Jaringan social bukanlah terjadi secara alami dan harus dibentuk melalui investasi strategis dengan orientasi pada institusionalisasi dari relasi group dapat digunakan sebagai sumber yang menguntungkan.⁷

Modal social yang diungkapkan oleh Fortes lebih menekankan pada adanya dua unsur utama, yaitu perwujudan yang berupa nilai dan batas solidaritas dan adanya informal yang berupa kepercayaan. Kedua hal ini menciptakan keuntungan melalui keanggotaan dalam jejaring struktur social. Dalam konteks ini modal social mempunyai tiga fungsi, yaitu ; pertama, sebagai sumber kontrol social. Kedua, Sebagai sumber dukungan dari famili. Ketiga, Sebagai sumber dari keuntungan melalui jejaring.

Putnam (1993) mengartikan modal social sebagai ciri dari organisasi social seperti jejaring, norma-norma, kepercayaan yang memudahkan kegiatan dan kerjasama untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut Putnam menyatakan bahwa modal social bukan untuk menggantikan kebijakan publik yang efektif tetapi merupakan prasyarat. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya modal social bekerja dalam negara dan pasar bukan disalah satu tempat saja. Pendekatan modal social menjanjikan menemukan cara baru dari kombinasi infra struktur social dengan kebijakan publik.

Jika social capital meningkat dengan meningkatnya jumlah orang yang berpartisipasi dalam asosiasi informal dan jaring-jaring kerja social (*net work*), maka anggotanya dapat memberikan kontribusi kepada social

⁵Fukuyama, F., 2001, *SocialCapital, Civil Society and development*, Third World quarterly, Vol. 22 No. 01, pp 7-20

⁶Krishna, A., 2000, *Creating and Harnesing Social Capital*, in Partha Dasgupa and Ismail Seragaldin (eds.) 2000, *Social Capital : A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washintong D.C.

⁷Portes, A., 1998, *social Capital : Its Orogins andApplications in modern Sociology*, Annual review of Sociology, Vol. 24, pp 1-24

capital komunitas mereka, dengan cara berpartisipasi dalam berbagai organisasi yang ada.⁸ Robert D. Putnam (1993) berdasarkan penelitiannya tentang 20 pemerintahan daerah di Itali pada tahun 1970, Putnam melihat bahwa sample penelitiannya yang mengalami kegagalan dalam menjalankan pemerintahannya, mereka bekerja tidak efisien, malas dan korupsi. Sementara yang lain berhasil dalam menciptakan program inovatif dan mengarahkan serta mengimplementasikan kebijakan. Putnam kemudian menemukan adanya atribut social capital dalam komunitas yang berhasil, dimana di dalamnya terdapat jaringan social yang kuat sehingga mampu menggerakkan partisipasi anggotanya. Sebaliknya untuk kasus yang tidak berhasil di dalamnya tidak ada jaringan social yang kuat yang mampu membangkitkan partisipasi anggotanya.

Menurut Bailey ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan, yaitu: *Pertama*, adanya keyakinan bahwa keputusan terbaik hanya bisa diambil apabila dalam prosesnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat yang terkena. *Kedua*, memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan dan untuk mendapatkan umpan balik dalam bentuk pengetahuan local. *Ketiga*, Adanya partisipasi masyarakat akan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam arti keputusan tersebut dapat diterima karena masyarakat dilibatkan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, minimal para pengambil keputusan dapat mengukur sampai sejauhmana reaksi masyarakat terhadap program tersebut,

baik yang mendukung maupun yang menentangnya.⁹

Ditinjau dari segi kualitas dalam Perspektif Teori Peranserta Masyarakat ada beberapa pandangan tentang peranserta¹⁰, yaitu :

- a. *Peranserta sebagai kebijaksanaan.* Dalam konteks ini partisipasi dilakukan berdasarkan dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk dimintai pendapatnya yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan.
- b. *Peranserta sebagai strategi.* Partisipasi dalam hal ini merupakan alat untuk memperoleh dukungan dari publik guna memperoleh kredibilitas keputusan yang sah.
- c. *Peranserta sebagai komunikasi.* Partisipasi dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menampung pendapat aspirasi masyarakat.
- d. *Peranserta sebagai pemecahan konflik.* Partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik. Dengan kata lain partisipasi ditujukan untuk memperoleh konsensus.
- e. *Peranserta sebagai terapi sosial.* Partisipasi dilakukan untuk menyembuhkan 'penyakit sosial'

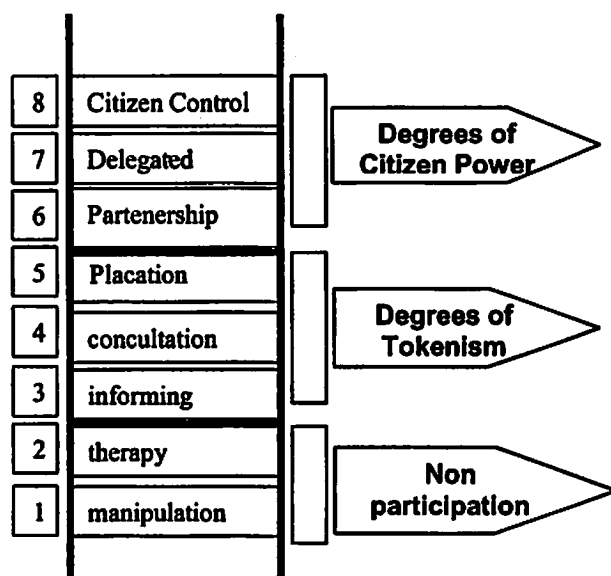
⁹Baley, J., 1990, *Institutional Arrangement Public Participation*, Makalah dalam seminar aplikasi analisis dampak Lingkungan dalam Proyek Perencanaan Pembangunan, Universitas Padjajaran Bandung, 16 – 26 Oktober 1990

¹⁰Sudharto P. Hadi, 2001, *Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi : Teori dan Gagasan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Makalah dalam seminar Internasional tentang Lingkungan Global dan Posisi Indonesia dalam tataran Lokal, Regional dan Nasional Program studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, 6 Juni 2001, Jakarta

⁸Putnam Robert D., 1993, *Making Democracy Work : Civil Traditions in Modern Italy*, Princeton N.J. Princeton University Press.

seperti rasa keterasingan (*alienation*), kurang percaya diri (*powerlessness*).

Sementara itu berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, Gaventa membagi peranserta dalam delapan karakteristik (tangga partisipasi)¹¹ sebagaiberikut:



Gambar 1. Bagan Tangga Partisipasi Masyarakat (Sumber : Gaventa (2001))

Pada tingkat yang paling bawah (1) *Manipulation (manipulasi)* dan (2) *therapy (penenteraman)* merupakan tingkat bukan peranserta atau "Nonparticipation". Tujuan dari model ini bukan untuk memberi kemampuan masyarakat untuk berperanserta tetapi untuk mengempukakan pemegang kekuasaan untuk 'mendidik' dan 'mengobati' para peserta dalam peranserta. Tingkat (3) *informing (menginformasikan)* dan (4) *consultation (konsultasi)* disebut tingkat 'tokenisme' atau sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Namun demikian

suara dan pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambil keputusan. Bentuk ke (5) *placation* dipandang sebagai tokenisme pada tingkat yang lebih tinggi dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan 'advice' tetapi kekuasaan untuk pengambil keputusan tetap ditangan pemegang kegiatan. Pada tingkat ke (6) *partnership*, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam penentuan keputusan dengan pemegang kekuasaan. Pada tingkatan ke (7) *delegated power* dan (8) *citizen control*, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Makna Ketahanan Sosial

Ketahanan social, ketahanan politik, ketahanan militer dan ketahanan budaya merupakan pembentuk ketahanan nasional. Dalam konteks sebagai sebuah kondisi menurut Budisantoso (1996) ketahanan nasional merupakan *output* atau *resultante* dari segenap upaya pembangunan nasional di sector ekonomi, social, politik, budaya dan militer pada saat tertentu, dalam rangka menuju tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945.¹² Dengan mengambil analog ketahanan nasional sebagai *output* atau *outcome*, maka ketahanan social merupakan *output* atau *outcome* dari suatu norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian ketahanan nasional merupakan ketangguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan eksistensinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat antar bangsa.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka ketahanan social merupakan

¹¹Gaventa, J., Camilo V., 2001, Mewujudkan Partisipasi : 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk abad 21, The British Council, Jakarta

¹²Budisantoso, S., 1996, Pengantar, dalam Ichlasul Amal dan Armady armawi (eds.) , Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

kemampuan individu-individu sebagai anggota dari sebuah lembaga atau komunitas dalam mengembangkan hubungan social sehingga dapat mempertahankan koeksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata kunci definisi ini adalah lembaga dan komunitas, hubungan social dan koeksistensi¹³ Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk tentunya memiliki berbagai karakteristik modal social antara daerah yang satu dengan lainnya. Namun secara umum menurut Nuryana (2002) indikator-indikator social capital pada masyarakat Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut : (1). Tingkat kepercayaan. (2) Kepercayaan kepada pemerintah. (3) Kecenderungan melakukan pemungutan suara (voting) untuk memutuskan hal penting. (4) mobilitas sosial. (5) Keanggotaanasosiasi dan jaringan-jaringan kerjainformal maupun formal. (6) tolong menolong untuk kepentingan upacara adat. (7) pesta olah raga local. (8) upacara adat tradisional untuk memilihara koneksi social. Dengan semakin lengkapnya indikator-indikator social capital tersebut dimiliki oleh sebuah komunitas maka solidaritas ketahanan sosial lembaga dan komunitas tersebut akan semakin kuat.

Lembaga dan komunitas dalam konteks ini adalah kelompok terkecil dalam system masyarakat. Hubungan social merupakan interaksi antar warga komunitas dalam menjalankan aktivitas social di lingkungannya di mana mereka berada. Sedangkan koeksistensi adalah hidup saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks intra dan antar komunitas. Ketahanan

¹³ Nuryana Mu'man, 2002, *Perspektif Social capital Dalam Pengembangan Ketahanan social Masyarakat*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta

Sosial merupakan kemampuan bertahan di tingkat system local dalam arus globalisasi dan desentralisasi.¹⁴

Ketahanan social masyarakat erat kaitannya dengan ketersediaan social capital. Secara sederhana ketahanan social suatu komunitas seringkali dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengatasi resiko akibat perubahan social, ekonomi politik yang mengelilinginya.¹⁵ Suatu komunitas memiliki ketahanan social apabila ada hal-hal: *Pertama*, memiliki kemampuan melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan social yang mempengaruhinya. *Kedua*, mampu melakukan investasi social dalam jaringan social yang menguntungkan. *Ketiga*, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Oleh karena itu tinggi rendahnya ketahanan social suatu komunitas tergantung dari efektif tidaknya: *melindungi anggotanya, menanamkan investasi social dalam jaringan social dan mengelola konflik serta kekerasan*.

Makna Kearifan Tradisional

Kearifan tradisional merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat

¹⁴ Betke, Friedhelm, Ph.D., 2002, *Statistik Ketahanan Sosial : Menuju Operasionalisasi Konsep Baru dalam Bidang statistik Sosial*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta

¹⁵ Achwan Rochman, Ph.D., 2002, *Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : Beberapa Catatan Empiris*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta

kebiasaan atau etika manusia yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan, alam, dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan manusia, alam dan bagaimana relasi diantara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.¹⁶

Ada beberapa karakteristik kearifan tradisional, yaitu; pertama, kearifan tradisional adalah milik komunitas. Dalam konteks ini kearifan tradisional dimiliki dan disebarluaskan secara kolektif dan terbuka kesemua anggota komunitas. Kedua, kearifan tradisional juga berarti pengetahuan tradisional. Dalam hal ini berkaitan dengan keraifan adat tentang bagaimana cara hidup yang baik dalam komunitas ekologis, berhubungan secara baik dengan semua isi alam dan berbagai aktivitas kehidupan yang mengacu kepada norma-norma tradisional baik itu berupa perintah ataupun larangan tentang berbagai aktivitas kehidupan seperti berburu, menebang pohon, bercocok tanam, menangkap ikan, bepergian dan lain-lain. Ketiga, kearifan tradisional bersifat holistic, dalam arti menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Dalam konteks ini alam tidak dilihat semata-mata sebagai obyek dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia semata, akan tetapi alam justru dipahami sebagai hal yang sarat dengan nilai dan pesan moral untuk menghormati kehidupan. Keempat, kearifan tradisional sebagai aktivitas moral. Aktivitas tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tradisional. Kelima, kearifan tradisional bersifat

local, karena terkait dengan tempat yang partikuler (komunitas masyarakat adat).

Kearifan tradisional dalam perkembangannya sering kali mengalami erosi bahkan tidak ditutup kemungkinan mengalami kepunahan. Menurut Keraf ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dan kepunahan kearifan tradisional, yaitu :

Pertama, terjadi proses sakralisasi alam oleh inovasi dan dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Apa yang sebelumnya dipahami sebagai misteri alam ternyata dalam perspektif ilmu pengetahuan modern hanya problem yang bisa dijelaskan secara ilmiah dan rasional. Konsekuinsinya tidak hanya alam yang diperlakukan secara sewenang-wenang dan eksploitatif, akan tetapi juga menggeser pemahaman alam sebagai yang sacral. Ketika sakralitas alam hilang, kearifan tradisional yang berkaitan dengan sakralitas tersebut dengan sendirinya hilang.

Kedua, alam tidak lagi bernilai sakral tetapi bernilai ekonomis tinggi. Dalam konteks ini ada pergeseran nilai terhadap alam, yang pada awalnya dianggap sakral telah berubah sebagai obyek untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seiring dengan bergulirnya proses modernisasi, sakralitas alam kehilangan esensinya sehingga dieksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang mengatasnamakan proses pembangunan.

Ketiga, dominasi filsafat dan etika Barat yang diwarnai paradigma cartesian (menempatkan manusia terpisah dari alam). Hubungan manusia dengan alam dalam komunitas ekologis sebagaimana dikenal dalam masyarakat tradisional dihilangkan.

Keempat, hilangnya keanekaragaman hayati. Sebagai akibat dari dampak modernisasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam pembangunan. Dampak selanjutnya adalah terkikisnya kearifan tradisional

¹⁶Keraf, A. Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

dengan segala nilainya, sebab kearifan tradisional terkait erat dengan keanekaragaman hayati.

Kelima, hilangnya hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk hidup dan bertahan sesuai dengan identitas dan keunikan tradisi budayanya serta kebebasan untuk menentukan diri sendiri.

Kearifan Tradisional Komunitas Kasepuhan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun

Kawasan Gunung Halimun ditetapkan sebagai Cagar alam berdasarkan SK Mentan No. 40/KPTS/1/1979, dengan luas lahan sekitar 41.710 Ha. Secara geografis Cagar Alam Gunung Halimun mencakup 3 wilayah kabupaten, yaitu Bogor, Sukabumi dan Lebak.

Halimun secara semantik dalam bahasa Sunda berarti kabut. Kawasan Ekosistem Halimun adalah kawasan pegunungan yang selalu diselimuti kabut. Halimun memiliki berbagai keunikan dan keragaman yang khas, baik dari sisi kekayaan biofisik, sistem sosial dan budaya masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya yang bermukim dan menjaga serta mengelola sumberdaya alam. Halimun telah menjadi pusat perhatian banyak pihak untuk menuliskan keberadaannya.¹⁷

Pengelolaan Kawasan Halimun dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda menetapkannya sebagai Kawasan Hutan Lindung seluas 39,941 hektar (tahun 1924-1934). Kawasan Lindung tersebut berubah menjadi Cagar Alam (Kawasan Konservasi) pada 1935-1961 dan pengelolaannya dilakukan oleh Jawatan Kehutanan Jawa Barat. Kemudian perubahan terjadi pada unit pengelola kawasan konservasi tersebut yang kewenangannya diberikan kepada

Perhutani (tahun 1961-1978) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) III Jawa Barat (1978-1990). Pada tahun 1990 pengelolaan kawasan konservasi itu digabungkan dengan Pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kemudian melalui SK Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Februari 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dengan luas 40.000 hektar. Pada tanggal 31 Maret 1997 melalui SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997 ditetapkan pengelolaannya oleh UPT TNGH setara dengan Eselon III dibawah Departemen Kehutanan. Kebijakan terakhir adalah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 tentang penunjukan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi 113.357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGH-S).

Masyarakat Kasepuhan bisa menerima keberadaan Taman Nasional, selama mereka asih diberi akses. Sebelum tahun 2003, masyarakat menggarap lahan pertanian mereka di wilayah Perhutani (di sekitar Taman Nasional) yang dalam konsep mereka termasuk *Leweung garapan* (hutan garapan) dengan cara tumpangsari. Walaupun harus membayarpungutan kepada Perhutani sebesar 15 – 25% dari hasil tani (cukai Perhutani) tergantung besarnya jumlah hasil tani atau sesuai kesepakatan.¹⁸

Gunung Halimun merupakan salah satu cagar alam yang terpenting di Jawa barat. Pada tahun 1978 UNDP telah membuat rencana pengelolaan di Kawasan Gunung Halimun, akan tetapi

¹⁷Emile & Suwito, 2006, Taman Nasional Gunung Halimun & Masyarakat Adat Kasepuhan, Warta Tenure Nomor 2 Mei 2006, www.wg-tenure.org

¹⁸Rita Rahmawati et.al, 2008, Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio Ekologis, Bogor : Jurnal Sodality ; Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia

pengelolaannya kurang efektif.¹⁹ Ketidak efektifan tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus pelanggaran yang ada disana, misalnya : penangkapan satwa liar disekitar kawasan Gunung Halimun. Ketidak efektifan tersebut merupakan implikasi dari kebijakan pembangunan yang semata-mata meniru para penganut teori modernisasi barat yang berpandangan bahwa usaha menyelamatkan manusia dari jurang kemiskinan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi yang selalu mengacu pada pola pemikiran barat. Dengan demikian strategi pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengabaikan system pengetahuan local yang merupakan refleksi nilai-nilai budaya masyarakat local sebab pola yang ada masih mengacu pada model sentralistik.

Pola pembangunan pedesaan yang berorientasi dari atas mengundang kritikan-kritikan dari para ahli dan mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru tentang pembangunan, Sjahrir dan Korten (1988) misalnya menawarkan system pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered perspectives*), yaitu upaya pembangunan dengan memusatkan perhatian pada rakyat dan kesejahteraannya.²⁰ Pemikiran lainnya adalah paham pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan yang secara hukum diperkuat dengan produk perundangan dari ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan) dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Fokus kajian Korten dan Sjahrir adalah adanya kepastian hukum terhadap berbagai dampak pembangunan ekonomi, sehingga arah akan menjamin

kepentingan rakyat bukan hanya para pelaku ekonomi (pengusaha atau industriawan) saja dan model pembangunan yang ditempuh yang berupaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Di Indonesia isu gerakan lingkungan kondisinya hampir sama dengan negara berkembang lainnya, yaitu sebagai reaksi terhadap praktek pembangunan (*terutama industrialisasi*) yang kurang mengindahkan kelestarian sumber daya alam. Selama ini *konsep kelestarian* cenderung hanya mengacu pada *lingkungan fisik semata*. Akibatnya konsep kebersihan misalnya, diasosiasikan dengan sampah. Bahkan "*Green imperialisme*" yang dewasa ini menjadi isu global pun, konsep kelestariannya hanya mengacu pada lingkungan fisik semata, mereka yang menyebut dirinya sebagai *environmentalists* seringkali hanya berkampanye untuk pelestarian lingkungan fisik semata. Dalam konteks ini menurut Dr. Ahmad S. Adnanputra, MS (1993) konsep pelestarian seharusnya juga mengacu pada *kesejahteraan umat manusia* masa kini dan dimasa depan, sehingga yang harus dilestarikan adalah *potensinya* bukan hanya *kondisinya*. Sebab mutu hidup tidaklah semata-mata fisik dan ditentukan oleh lingkungan eksternal, akan tetapi yang dimaksud dengan lingkungan juga mengandung aspek-aspek; eko cultural yang menyangkut sub aspek fisik (ekologi/ekosistem) dan aspek non fisik (budaya/tradisi/nilai-nilai) serta dimensi waktu yang menyangkut sub aspek masa kini dan sub aspek masa depan.²¹ Dengan demikian sudah saatnya disadari sepenuhnya bahwa

¹⁹Saleh C., 1991, Action Research Bersama Masyarakat Sekitar Kawasan Penyangga Hutan Cagar Alam Pegunungan Halimun Jawa Barat, Jurnal Riset Aksi Lembaga Penelitian UNS, Surakarta

²⁰Sjahrir dan korten D.C., 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, yayasan Obor, Jakarta

²¹Ahmad S. Adnanputra, Dr. MS., 1993, *Tuno Sathak – Bathi Sanak : Konsep Bisnis Berwawasan Lingkungan Yang diangkat dari Butir-butir Budaya Jawa*, Jurnal USAHAWAN No. 4 TH. XXII April 1993, Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

lingkungan itu bukan hanya sekedar lingkungan fisik dan wawasan lingkungan itu bukanlah semata-mata konsep import dari Barat, akan tetapi sudah sejak lama telah berakar pada budaya dan tradisi bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Di kalangan orang Kasepuhan yang bermukim di sekitar Gunung Halimun memiliki tradisi dalam mengelola sumberdaya alam di hutan, ladang, sawah, kebun, sungai melalui pembagian zona pengelolaan sumberdaya hutan. Mereka membagi ruang hutan menjadi tiga klasifikasi yang masing-masing memiliki fungsi konservasi dan secara seimbang mendukung kehidupan manusia. Pertama, hutan atau leuweung tutupan/awisan/geledegan yang boleh dieksploitasi manusia hanya berupa produk hutannya saja, seperti madu, rotan, getah damar, sarang burung wallet. Kedua, hutan titipan berupa hutan cadangan yang boleh digunakan.²²

Kepercayaan lokal (Kearifan tradisional) atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Nurma, 2007). Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai "kearifan atau kebijaksanaan". Lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain

sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya.²³

Bentuk kearifan lokal masyarakat Adat Kasepuhan beragam, hasil penelitian Ing Moh. Ichsan pada tahun 2009 tentang etika lingkungan Masyarakat Adat Kasepuhan menunjukkan ada beberapa bentuk, antara lain mencakup: Pertama, Pedoman hidup masyarakat Adat Kasepuhan yang memandang bahwa kehidupan merupakan bagian dari arwah nenek moyang. Implementasi lebih lanjut dari nilai-nilai ini tindakan yang dilakukan masyarakat kasepuhan, antara lain : (1) agar tidak mengalami kesulitan dan kesusahan berpedoman; "kudu bisa ngeureut neunden" artinya dalam kehidupan agar menghindari hidup mewah tetapi harus hidup hemat untuk menghadapi kebutuhan yang bisa datang tiba-tiba. (2) Pepatah "Nu gawir awian, nu legok balongan, nu rata sawahan" artinya kalau ada tebing ditanami pepohonan/bambu, kalo ada kubangan dijadikan kolam, kalau tanah datar untuk persawahan". Nilai-nilai kearifan tersebut menganjurkan pemanfaatan lingkungan secara tepat sesuai kondisinya. Kedua, Pandangan masyarakat Kasepuhan tentang Hutan: (1). Hutan alam, hutan tua, hutan primer (Leuweung Tutupan) merupakan kawasan yang tidak boleh diganggu & dirusak serta sebagai kawasan harus dilindungi., (2) Leuweung titipan /hutan cadangan, (3) Leuweung sampalan /lahan garapan & kawasan budidaya. Bentuk kearifan local ini merupakan bentuk tindakan perlakuan terhadap kawasan hutan sesuai dengan zona dan penerapan teknologinya.²⁴

²²Adimaharja K., 2003, Sistem Pengetahuan dan teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, INRIK (Indonesian Resource Center for Indigeneous Knowledge) Universitas Padjajaran Bandung

²³Nurma Ali Ridwan, 2007, Landasan Keilmuan Kearifan Lokal, Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibda' P3M STAIN Purwokerto Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2007

²⁴Ing Moh. Ichsan, 2009, Etika Lingkungan Masyarakat Adat Kasepuhan dalam Pengelolaan Hutan di Kawasan

Hasil penelitian Rita Rahmawati dkk pada tahun 2008 tentang pengetahuan local masyarakat Adat Kasepuhan dalam bertani mengacu pada konsep-konsep: (1). Ibu bumi, yaitu aktivitas mengolah tanah dan menanaminya merupakan bentuk penghormatan kepada ibu bumi, yaitu Dewi Sri. Dalam konteks mencakup ritus dari mulai menanam, memanen, memasak dan memakannya menggunakan tata cara penghormatan. (2) Bapak langit merupakan bentuk pengetahuan lokal yang berlandaskan pada kejadian di alam semesta (langit) dalam hal menentukan waktu menggarap tanah melihat pada bintang kerti dan kidang. Dalam konteks ini, masyarakat kalau bintang kerti sudah terlihat maka petani harus sudah menyiapkan peralatan cangkul, parang dan lainnya, sedangkan kalau bintang Kidang (rasi bintang waluku bentuknya seperti layang-layang) maka petani sudah diperbolehkan untuk turun ke sawah/huma untuk menggarap lahannya. (3) Guru Mangsa. yaitu berguru kepada alam semesta dalam hal menentukan waktu kapan boleh bertani dan tidak.²⁵

Modal social dan Relevansinya dalam Membentuk Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan

Untuk melihat peranan dan pentingnya social capital dalam pengembangan ketahanan social masyarakat, menurut Woolcock (1998) dapat dibedakan menjadi empat perspektif, yaitu : pertama, *communitarian view*, berhubungan dengan pandangan organisasi local. Kedua, *Network view*, menekankan pentingnya asosiasi vertical

maupun horizontal antar orang dalam hubungannya dengan dan antar entitas organisasi, seperti community group.

Ketiga, *Institutional view*, memandang bahwa vitalitas community networks dan civil society merupakan produk lingkungan politik, hukum dan institusional. Keempat, *Synergy view* berupaya mengintegrasikan bekerjanya dua buah kekuatan yang dari perspektif yang berbeda antara networks dan institusional.

Berdasarkan hasil beberapa kajian sebagaimana dipaparkan di atas, relevansi modal sosial dalam membentuk ketahanan social masyarakat Adat Kasepuhan secara ringkas dapat dikategorikan dalam matrik berikut ini:

Taman Nasional Gunung Halimun Salak
Inspirasi Taoisme, Yogyakarta : Program
Pascasarjana Fakultas Filsafat UGM

²⁵Rita Rahmawati et.al, 2008, Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan : Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio Ekologis, Bogor : Jurnal Sodality ; Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia

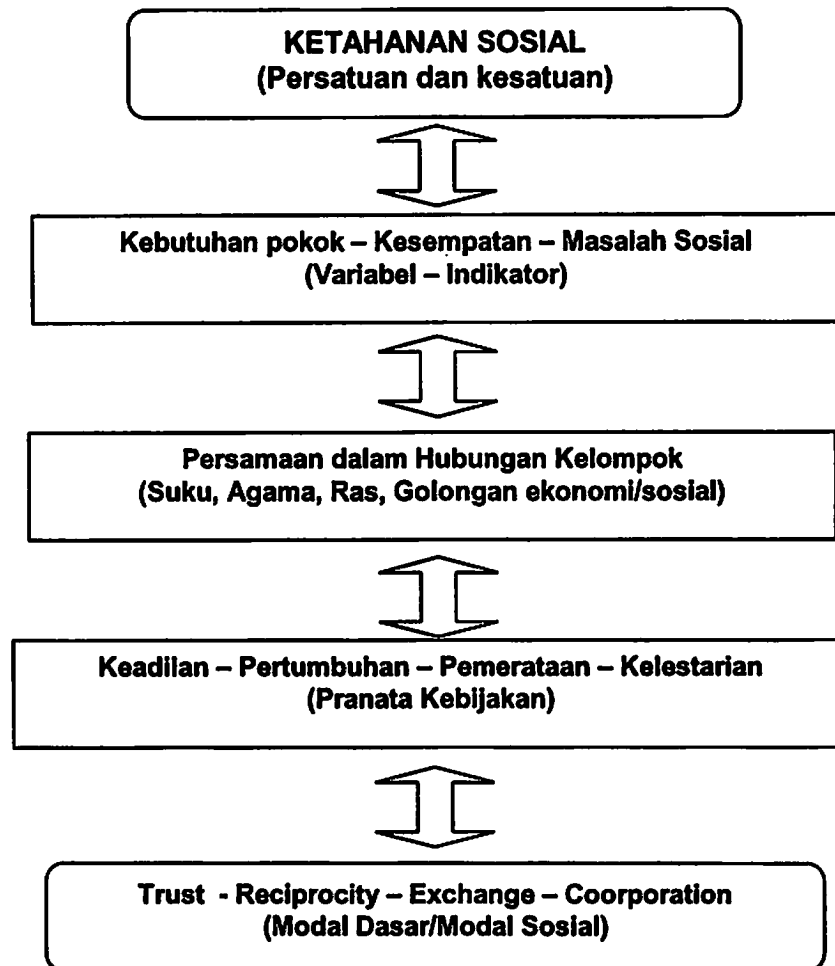
Matrik 1
Tipologi Modal Sosial dalam Membentuk Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Kasepuhan

BENTUK MODAL SOSIAL	BENTUK KEARIFAN LOKAL	BENTUK KETAHANAN SOSIAL
Aspek trust (kepercayaan)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Konsep-konsep dalam bertani : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ibu Bumi (penghormatan kepada ibu bumi /Dewi Sri) ➢ Bapak langit (berdasarkan perbintangan) ➢ Guru Mangsa (mengacu pada alam semesta) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Budaya bertani yang selaras dengan alam ❖ Pola tanam yang sesuai dengan musim
Aspek norma-norma (norms)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pepatah : “kudu bisa ngeureut neunden” (artinya dalam kehidupan agar menghindari hidup mewah) ❖ Pepatah “Nu gawir awian, nu legok balongan, nu rata sawahan” (artinya kalau ada tebing ditanami pepohonan/bambu, kalo ada kebugan dijadikan kolam, kalau tanah datar untuk persawahan) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyimpan / menabung untuk Kesiapan dalam menghadapi berbagai kejadian di masyarakat
Aspek networking	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Konsep masyarakat terhadap Hutan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Leuweung Tutupan/hutan alam/lindung, 2. Leuweung titipan/hutan cadangan, 3. Leuweung sampalan/lahan garapan & kawasan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terbentuk Jaringan pelestarian kawasan konservasi

Sumber: diadopsi dari Iling M. Ichsan (2009) & Rita R. et. Al (2008)

Pengalaman empiris di atas membuktikan bahwa eksistensi social capital pada masyarakat pedesaan relatif masih terpelihara dan menunjukkan bahwa *social capital* (termasuk di dalamnya kearifan local) masih berfungsi dengan baik serta memberikan kontribusi yang positif dalam membentuk ketahanan social masyarakat dalam pembangunan. Ketahanan social dalam konteks ini adalah keseluruhan dari kemampuan

unit-unit sosial untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasarnya. Kemampuan untuk tetap dapat mencari mekanisme pemecahan masalah yang mengikuti norma-norma dan mekanisme masyarakat tersebut. Diagram berikut ini merupakan upaya untuk menjabarkan keterkaitan antara modal sosial dengan ketahanan social yang dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Keterkaitan antara Ketahanan Sosial dan Modal Sosial
Sumber : Laksono (2002)²⁶

²⁶Laksono, B., 2002, Catatan Pengembangan Indikator Ketahanan Sosisl : Simulasi Penerapan Indikator untuk Wilayah DKI Jakarta, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta

Penutup

Ketahanan sosial masyarakat erat kaitannya dengan ketersediaan sosial capital. Secara sederhana ketahanan sosial suatu komoniti seringkali dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi politik yang mengelilinginya. Suatu komoniti memiliki ketahanan sosial apabila ada hal-hal : *Pertama*, memiliki kemampuan melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang memengaruhinya. *Kedua*, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. *Ketiga*, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Oleh karena itu tinggi rendahnya ketahanan sosial suatu komunitas tergantung dari efektif tidaknya: *melindungi anggotanya, menanamkan investasi sosial dalam jaringan sosial dan mengelola konflik serta kekerasan.*²⁷

Konsep modal sosial (social capital) pada dasarnya bertumpu pada prinsip-prinsip yang sama, yaitu bahwa dalam modal sosial terdapat kepercayaan, jejaring sosial, norma, kebudayaan dan lebih bersifat informal. Social capital penting dalam mengembangkan ketahanan sosial masyarakat. Social capital dipandang sebagai independent variabel, sedangkan ketahanan sosial sebagai dependent variable. Implikasinya adalah bahwa fluktuasi yang terjadi pada social capital berpengaruh besar terhadap ketahanan sosial masyarakat sebagai sebuah outcome.

²⁷Achwan Rochman, Ph.D., 2002, *Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : Beberapa Catatan Empiris*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta

Daftar Pustaka

- Ahmad S. Adnanputra, Dr. MS., 1993, *Tuno Sathak – Bathi Sanak : Konsep Bisnis Berwawasan Lingkungan Yang diangkat dari Butir-butir Budaya Jawa*, Jurnal USAHAWAN No. 4 TH. XXII April 1993, Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Achwan Rochman, Ph.D., 2002, *Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : Beberapa Catatan Empiris*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta
- Adimaharja K., 2003, *Sistem Pengetahuan dan teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, INRIK (Indonesian Reseource Center for Indigeneous Knowledge) Universitas Padjajaran Bandung
- Baley, J., 1990, *Institutional Arrangement Public Participation*, Makalah dalam seminar aplikasi analisis dampak Lingkungan dalam Proyek Perencanaan Pembangunan, Universitas Padjajaran Bandung, 16 – 26 Oktober 1990
- Betke, Friedhelm, Ph.D., 2002, *Statistik Ketahanan Sosial : Menuju Operasionalisasi Konsep Baru dalam Bidang statistik Sosial*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengem-

- bangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta
- Budisantoso, S., 1996, Pengantar, dalam Ichlasul Amal dan Armady armawi (eds.) , Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Dove, R, Michael (Ed),1985, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fukuyama, F., 2001, SocialCapital, Civil Society and development, Third World quarterly, Vol. 22 No. 01, pp 7-20
- Gaventa, J., Camilo V., 2001, Mewujudkan Partisipasi : 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk abad 21, The British Council, Jakarta
- Iing Moh. Ichsan, 2009, Etika Lingkungan Masyarakat Adat Kasepuhan dalam Pengelolaan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Inspirasi Taoisme, Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Filsafat UGM
- Keraf, A. Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Krishna, A., 2000, Creating and Harnesing Social Capital, in Partha Dasgupa and Ismail Seragaldin (eds.) 2000, Social Capital : A Multifaceted Perspective, The World Bank, Washintong D.C.
- Laksono, B., 2002, Catatan Pengembangan Indikator Ketahanan Sosisl : Simulasi Penerapan Indikator untuk Wilayah DKI Jakarta, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta
- Nordholt, Nico S., 1987, *Ojo Dumeh : Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Nuryana Mu'man, 2002, *Perspektif Social capital Dalam Pengembangan Ketahanan social Masyarakat*, Makalah dalam Acara Diskusi Pakar tentang 'Pengembangan Konsep ketahanan Sosial Masyarakat' yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial pada tanggal 7 Oktober 2002, Jakarta
- Portes, A., 1998, social Capital : Its Orogins andApplications in modern Sociology, Annual review of Sociology, Vol. 24, pp 1-24
- Rita Rahmawati et.al, 2008, Penge-tahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan : Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio Ekologis, Bogor : Jurnal Sodality ; Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol 2 2008
- Saleh C., 1991, Action Research Ber-sama Masyarakat Sekitar Kawasan Penyangga Hutan Cagar Alam Pegunungan Halimun Jawa Barat, Jurnal Riset Aksi Lembaga Penelitian UNS, Surakarta

Sjahrir dan korten D.C., 1988,
*Pembangunan Berdimensi
Kerakyatan*, yayasan Obor, Jakarta

Sudharto P. Hadi, 2001, *Peranserta
Masyarakat dan Keterbukaan
Informasi : Teori dan Gagasan
dalam Pengelolaan Lingkungan*,
Makalah dalam seminar
Internasional tentang Lingkungan
Global dan Posisi Indonesia dalam
tataran Lokal, Regional dan
Nasional Program studi Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan
Hidup Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Jakarta, 6 Juni
2001, Jakarta

Thamrin Juni,, 2003, *Catatan-catatan
Mengenai Pemberdayaan Pranata
Sosial Melalui Pendekatan Parti-
sipasi Sosial*, Makalah dalam
Acara Diskusi Pakar tentang
'Pengembangan Model Pem-
berdayaan Pranata Sosial dalam
mewujudkan ketahanan Sosial'
yang diselenggarakan oleh Badan
Pelatihan dan Pengembangan
Sosial Departemen Sosial pada
tanggal 13 Mei 2003, Jakarta

Woolcock, M., 1998, Social Capital and
Economic Development Toward a
theoretical synthesis and policy
framework, *Theory and society*,
Vol. 27 No.2, pp 151 – 208